

ABSTRAK

Michelle Audree Ongko (02659220010)

ANALISIS TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS JUAL BELI MANUSIA ILEGAL DI JAWA TENGAH

(xv + 79 halaman)

Penyedia jasa TKI ilegal seringkali menggunakan modus bisnis dengan menawarkan hendak mempekerjakan manusia namun terdapat tujuan terselubung yaitu perdagangan manusia dan kebanyakan tenaga migran asal negara Indonesia menjadi sasaran empuk dalam hal ini. Oleh karena itu melalui penelitian ini diangkat sebuah kasus menyangkut tenaga kerja migran Indonesia yang dipimpin suatu korporasi dan dijalankan direktur utamanya selaku pengurus dan sebagai *directing mind* dan *fungsiional daderschap* pimpinan yang diduga terlibat kasus perdagangan manusia AI dan menjalankan perusahaannya secara ilegal. Perbuatan pidana oleh pengurus perusahaan tersebut merupakan kejahatan korporasi dan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indoensia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian lain terkait kejahatan oleh korporasi di waktu yang akan datang.

Referensi: 56 (1945-2024).

ABSTRACT

ANALYSIS OF CORPORATE CRIME AGAINST INDONESIAN MIGRANTS: CASE STUDY OF BUYING AND SELLING ILLEGAL PEOPLE IN CENTRAL OF JAVA.

(xv + 79 pages)

Illegal migrant worker service providers often use the business mode of offering to employ people, but there is a hidden aim, namely human trafficking and most migrant workers from Indonesia are easy targets in this case. Therefore, through this research, a case was raised regarding Indonesian migrant workers who were led by a corporation and run by its main director as management and as the directing mind and functional leader who was suspected of being involved in AI human trafficking cases and running the company illegally. Criminal acts by company management constitute corporate crimes and can be subject to criminal sanctions based on Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking because it violates the provisions of Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. It is hoped that this research can become a reference for other research related to corporate crime in the future.

Reference: 56 (1945-2024).